

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Garner, Bryan . 2004. *Black,s Law Dictionary 8th Edition*. Paul : West Publishing
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- B. Ter Haar Bzn. 1980. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Diterjemahkan oleh K. Ng. Soebekti Poesponoto*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Bott, Bruce dan Ruth Talbot-Stokes. 2010. *Names and Cross' Effective Legal Research, 4th Edition*. Australia : LexisNexis Butterworth.
- Chomzah, Ali Ahmad. 2004. *Hukum Agraria Pertanahan Indonesia*. Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Fuady, Munir. 2008. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global, cet.III*. Bandung: Citra Aditya.
- Gautama, Sudargo. 1990. *Tafsir Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Harsono, Boedi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia*, Cetakan ke -19. Jakarta : Djambatan.
- HB. Sutopo. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta : UNS Press.
- Idrus, Muhammad. 2007. *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Yogyakarta : UII Press.
- Kasim, Ifdal. 1996. *Tanah sebagai Komoditas : Kajian kritis atas Kebijakan Pertanahan Orde Baru*. Jakarta : ELSAM.
- Lichfield, Nathaniel dan Haim Darim-Drabkin. 1980. *Land Policy in Planning*. London: George Allen & Unwin Ltd.
- Limbong, Bernhard. 2012. *Hukum Agraria Nasional*. Jakarta : Margaretha Pustaka.
- Limbong, Bernhard. 2012. *Reforma Agraria*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Limbong, Bernhard. 2014. *Politik Pertanahan*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Marwan dan Jimmy. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher.

- Murad, Rusmadi. 2007. *Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan*. Bandung : Mandar Maju.
- Noor, Aslan. 2006. *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia dari Ajaran Hak Asasi Manusia*. Bandung : Mandar Maju.
- Nur, Sri Susanti . 2010. *Urgensi Bank Tanah*. Makassar : Pustaka Pena Press.
- Ochtorina, Dyah dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Parlindungan, A.P. 1991. *Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung: Mandar Maju.
- Perangin, Efendi. 1996. *Praktek Pengurusan sertipikat hak atas tanah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Pusat Bahasa dan Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional
- Saleh, Wantjik. *Hak Atas Tanah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Santoso, Urip. 2009. *Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah*. Jakarta : Kencana.
- Santoso, Urip. 2014. *Hukum Perumahan*. Jakarta : Prenamedia Grup.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Sutadi, Adrian. 2009. *Tinjauan Hukum Pertanahan*. Jakarta : Pradya Paramita.

B. Internet, Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

- <http://kip.keretaapi.co.id/page/profil%20PT.%20kereta%20api%20Indonesia%20persero/16>, diakses pada tanggal 2 Maret 2018 pukul 23.29 WIB.
- <http://smg-utara.blogspot.co.id/p/profil-kecamatan.html/>, diakses pada tanggal 2 Maret 2018 Pukul 23.39
- Dwi Prakosa, Ismail. 2017. *Pelepasan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengembalian Fungsi Tanah Di Bantaran Sungai Bengawan Solo Kota Surakarta*. Semarang : Skripsi Undip.

- Safitri, Anisa. 2017. *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (studi Kasus Proyek Pembangunan Waduk Logung di Kabupaten Kudus)*. Semarang : Skripsi Undip.
- Tobing, Vanesa Tabita. 2014. *O"Overlapping" Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Semarang*. Semarang : Skripsi Undip.
- Putra, Mochammad Rizki Denia . 2014. *Konflik dalam Penertiban Aset Milik PT. Kereta Api*. Jember : JurnalUM Jember.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah.
- Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Konversi Hak-Hak Barat.
- Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat.